



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

IMPLEMENTASI PENATAAN PEDAGANG DI PASAR TRADISIONAL BERBASIS MODERN TELUK KUANTAN

Fitri Nurhidayanti

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi
Jalan Gatot Sibroto KM 7 Kebun Nenas Jake Teluk Kuantan
Email: fitrinurhidayanti21@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 24 of 2019 concerning Guidelines for the Arrangement and Empowerment of Street Vendors in the Modern-Based Traditional Market of Kuantan Bay. The focus of the research is the process of implementing street vendor relocation policies by local governments, including factors that affect success such as communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The research method used is qualitative descriptive with a field study approach through observation, interviews, and documentation. The research findings show that the implementation of the policy has not been implemented yet.

Keywords: Implementation, Policy, Street Vendors, Relocation.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pedoman Penataan Pedagang di Pasar Tradisional Berbasis Modern Teluk Kuantan. Fokus penelitian adalah proses pelaksanaan kebijakan relokasi PKL oleh pemerintah daerah, mencakup faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan seperti komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum terimplementasi

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Pedagang Kaki Lima, Relokasi.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam pengelolaan dan pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL) di pasar tradisional, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan menciptakan lingkungan perdagangan yang tertib. Keberadaan PKL memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dengan menyediakan barang dan jasa dengan harga terjangkau. Namun, tanpa penataan yang baik, keberadaan mereka dapat



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

menimbulkan berbagai permasalahan, seperti kemacetan, ketidakteraturan tata kota, dan kebersihan lingkungan yang kurang terjaga. Dalam menghadapi tantangan ini, pemerintah daerah perlu mengambil langkah strategis dalam menata dan memberdayakan PKL agar mereka dapat beroperasi secara lebih teratur dan berkelanjutan. Landasan hukum utama dalam pengelolaan PKL adalah Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 24 Tahun 2019 secara khusus mengatur tentang penataan pedagang di lahan pasar Teluk Kuantan. Pasal 3 dan pasal 4 dalam regulasi ini menyatakan mengatur lokasi dan tata letak pedagang di lahan pasar serta pemindahan pedagang untuk mendukung ketertiban dan kelancaran pelaksanaan kegiatan di Teluk Kuantan.

Meskipun regulasi telah ditetapkan, implementasi kebijakan ini tidak selalu berjalan mulus. Beberapa kendala yang sering dihadapi meliputi: 1. Kurangnya sosialisasi kepada PKL mengenai kebijakan relokasi, 2. Ketidakpuasan pedagang terhadap lokasi baru karena dianggap kurang strategis. 3. Minimnya dukungan infrastruktur di lokasi relokasi, seperti akses transportasi, fasilitas sanitasi, serta sarana pendukung usaha lainnya. Di Kabupaten Kuantan Singingi, upaya relokasi PKL dilakukan sebagai bagian dari penataan ruang kota agar lebih tertib dan nyaman. PKL yang masih berjualan di trotoar dan bahu jalan menunjukkan bahwa tantangan dalam implementasi kebijakan ini masih besar. Aktivitas mereka kerap mengganggu ketertiban umum, menyebabkan kemacetan, dan menurunkan kualitas kebersihan lingkungan. Namun, di sisi lain, sektor informal ini juga menjadi tumpuan ekonomi bagi banyak masyarakat yang kesulitan mendapatkan pekerjaan di sektor formal. Keberadaan PKL yang tidak tertata dengan baik dapat menyebabkan berbagai masalah, di antaranya: 1. Pemanfaatan ruang publik yang tidak sesuai dengan peruntukannya, mengganggu mobilitas masyarakat. 2. Ketidakteraturan tata ruang kota, yang dapat menghambat pengembangan infrastruktur perkotaan. 3. Dampak lingkungan, seperti meningkatnya sampah dan pencemaran akibat kurangnya fasilitas kebersihan di area PKL. 4. Kerawanan sosial, termasuk potensi meningkatnya tindakan kriminal akibat lingkungan yang tidak teratur.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 24 Tahun 2019 Pasal 3 dan 4 pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyediakan tempat usaha yang aman, tertib, dan layak bagi PKL. Hal ini mencakup penyediaan lokasi yang strategis, fasilitas pendukung seperti sanitasi dan akses transportasi yang baik, serta pendampingan dalam pengelolaan usaha. Namun, tantangan utama yang masih dihadapi adalah bagaimana memastikan bahwa lokasi relokasi dapat benar-benar memberikan keuntungan bagi para pedagang, sekaligus menciptakan keteraturan dalam tata ruang kota. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 24 Tahun 2019 di Pasar Tradisional Berbasis Modern Teluk Kuantan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam penataan dan pemberdayaan PKL.



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

1.2 Rumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : “Bagaimana Implementasi Penataan Pedagang Di Pasar Tradisional Berbasis Modern Teluk Kuantan ”.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Penataan Pedagang Di Pasar Tradisional Berbasis Modern Teluk Kuantan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini bisa menjadi bahan pembelajaran, pemahaman dan pengalaman terhadap pengetahuan yang selama ini di pelajari dan didapat dalam penelitian khususnya dalam ilmu administrasi negara. Serta Penelitian ini bisa bermanfaat bagi pengembangan ilmu perekonomian pada ilmu administrasi negara.

1.4.2 Manfaat Praktis

Harapan dalam hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsi kepada pemerintah daerah dalam relokasi pedagang kaki lima ini bisa mensejahterakan masyarakat. Serta Memberikan pemahaman untuk kepada dunia usaha dalam pentingnya kebijakan pemerintah setempat dalam merelokasi pedagang kaki lima tersebut.

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori/Konsep Administrasi Negara

Menurut Nawawi (2013:79) administrasi negara adalah administrasi mengenai negara dalam keseluruhan arti, unsur, dimensi, dan dinamikanya yang terus bergerak dan terkait dengan konteks sosial dan lingkungan yang ada disekitarnya. Menurut Siagian (dalam Rahman, 2017:8) administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu bentuk usaha kerja sama demi tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut Syafiie (2016:13) administrasi merupakan suatu fenomenal sosial, suatu perwujudan tertentu di dalam masyarakat modern. Eksistensi daripada Administrasi itu berkaitan dengan organisasi, artinya administrasi itu terdapat didalam suatu organisasi. Jadi barang siapa yang ingin mengetahui adanya administrasi dalam masyarakat ia harus mencari terlebih dahulu suatu organisasi yang masih hidup, disitu terdapat administrasi. Menurut Amin (dalam Makmur, 2017:62) administrasi meliputi seluruh upaya penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi kegiatan manajemen pemerintahan (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan pembangunan) dengan mekanisme kerja dan dukungan sumber daya manusia serta dukungan administrasi atau tatalaksananya. Selanjutnya administrasi negara adalah proses pemikiran dan tindakan oleh aparatur negara untuk menciptakan instrumen pengaturan kemudian dilaksanakan untuk melahirkan ketentuan melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

ditentukan sebelumnya secara efisien dan efektif untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan pengertian menurut para ahli di atas administrasi adalah suatu disiplin ilmu dan praktik manajerial yang terlibat dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya manusia, materiil, dan informasi untuk mencapai tujuan organisasi atau sistem. Dalam ruang lingkup ini, administrasi tidak hanya mengacu pada kegiatan manajemen internal, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor eksternal, termasuk interaksi sosial, budaya organisasi, dan dampak kebijakan terhadap masyarakat. Sebagai suatu konsep yang sangat luas, administrasi mencakup pengelolaan efisien dan efektif semua aspek organisasi, memerlukan pemahaman yang mendalam tentang dinamika internal dan eksternal yang memengaruhi proses pengambilan keputusan serta pencapaian tujuan organisasional.

2.1.2 Teori/Konsep Kebijakan

Menurut Friedrich (dalam Hamdi, 2015:36) kebijakan adalah sebagai suatu tindakan yang disarankan mengenai perorangan, kelompok atau pemerintahan dalam suatu lingkungan tertentu berisikan hambatan dan kesempatan yang akan diatasi atau dimanfaatkan melalui kebijakan yang disarankan dalam upaya mencapai suatu tujuan atau mewujudkan suatu maksud. Menurut Dye (dalam Widodo, 2021:12) kebijakan publik adalah apapun yang pemerintah pilih untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan menurut Jones (dalam Salampessy dkk, 2023:2-3) istilah kebijakan publik digunakan dalam praktik sehari-hari, tetapi merujuk pada tindakan atau keputusan yang sangat berbeda. Kebijakan publik membutuhkan proses analisis mendalam, melibatkan pemahaman terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan politik. Dalam pemakaiannya, kebijakan publik dapat memberikan dampak langsung terhadap masyarakat, sehingga diperlukan keterlibatan dan partisipasi dari berbagai pihak terkait untuk memastikan keberhasilan implementasinya. Kesimpulannya, kebijakan publik bukan hanya sebagai pernyataan niat atau panduan, melainkan juga merupakan instrumen aktif yang berperan dalam membentuk dan mengarahkan perkembangan suatu negara.

2.1.3 Teori/Konsep Implementasi Kebijakan

Menurut Warwic (dalam Arifin Tahir, 2015 : 93) mengatakan bahwa : dalam implementasi kebijakan terdapat faktor-faktor yang perlu diperhatikan, yaitu : Kemampuan Organisasi, Informasi, Dukungan, dan Pembagian potensi. Pressman dan Wildavsky menyebutkan implementasi dimaksudkan membawa ke suatu hasil (akibat) melengkapi dan menyelesaikan. Implementasi juga di maksudkan menyediakan sarana (alat) untuk melaksanakan sesuatu, memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesuatu. Pressman dan Wildavsky mengemukakan bahwa: *"implementation as to carry out, accomplish, fulfil, produce, complete"* maksudnya: "membawa, menyelesaikan, mengisi, menghasilkan, melengkapi. (dalam Apriandi, 2017:13). Implementasi adalah suatu kegiatan atau suatu tindakan dari sebuah rencana yang dibuat secara terperinci untuk mencapai suatu tujuan.



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

Implementasi mulai dilakukan apabila seluruh perencanaan sudah dianggap sempurna. Implementasi menurut teori Jones bahwa: *“Those Activities directed toward putting a program into effect”* (Proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya). Jadi Implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. (dalam Rizkianty, 2021)

Dari pengertian implementasi menurut pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa kesuksesan implementasi sangat dipengaruhi oleh sejumlah faktor utama. Koordinasi efektif antara berbagai tahapan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, memainkan peran utama dalam menentukan hasil yang optimal. Dukungan dan partisipasi aktif dari pemangku kepentingan menjadi elemen penting, sementara adaptabilitas terhadap perubahan kondisi lingkungan juga merupakan aspek yang tidak dapat diabaikan.

2.1.4 Teori/Konsep Relokasi

Relokasi merujuk pada proses pemindahan individu atau kelompok dari satu lokasi ke lokasi lain, yang sering kali berkaitan dengan kebijakan pemerintah untuk mengatur penggunaan lahan. Relokasi sementara pedagang eceran bertujuan untuk meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat dan mengubah pola interaksi sosial antara pedagang dan konsumen" (Samahita, 2024: 960). Selain itu, relokasi juga melibatkan aspek negosiasi dan komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat untuk menghindari konflik dan memastikan keberhasilan proses tersebut. Sedangkan menurut Binsar M. Gulton (dalam Lailatus, 2022:94) mengungkapkan bahwa secara umum tak jarang relokasi dimaknai sebagai pemindahan lokasi berdasarkan segi ruang geografis. Meski begitu, relokasi mencakup permasalahan antar beragam konsep ruang misalnya ruang sosial, ekonomi, politik, budaya, sampai ke ruang lingkungan hayati. Setiap lokasi memiliki peluang dan batas masing-masing. Dalam memilih lokasi akan lebih memungkinkan bila relokasi dan pemulihan pendapatan berhasil karena lokasi yang dipilih sama baiknya dengan tempat terdahulu dari segi ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan.

Relokasi merupakan suatu konsep yang melibatkan perpindahan suatu entitas dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Konsep ini dapat diterapkan dalam berbagai konteks, termasuk perusahaan, individu, atau bahkan komunitas. Dalam konteks bisnis, relokasi perusahaan dapat menjadi strategi yang penting untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperluas pasar, atau mengakses sumber daya yang lebih baik. Proses relokasi perusahaan dapat melibatkan pemindahan kantor pusat, pabrik, atau gudang, dengan tujuan meningkatkan aksesibilitas terhadap pasar atau memanfaatkan faktor lingkungan yang lebih kondusif. Di sisi lain, relokasi juga dapat menjadi solusi untuk permasalahan sosial dan lingkungan. Dalam konteks ini, relokasi mungkin terkait dengan pemindahan komunitas yang terpengaruh oleh bencana alam atau perubahan iklim. Pemerintah dan organisasi non-profit sering kali terlibat dalam upaya relokasi untuk melindungi masyarakat dari risiko yang dapat membahayakan nyawa atau keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu,



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

konsep relokasi dapat diaplikasikan secara luas, baik dalam rangka pengembangan bisnis maupun untuk menjawab tantangan sosial dan lingkungan.

2.1.5 Teori/Konsep Pedagang Kaki Lima (PKL)

Pedagang kaki lima (PKL) adalah individu atau kelompok yang menjalankan usaha kecil di sektor informal dengan modal relatif kecil, menjual barang atau jasa di tempat strategis seperti trotoar, bahu jalan, atau area publik lainnya tanpa izin formal. Kegiatan mereka umumnya tidak terorganisir, tidak tetap, dan sering dianggap mengganggu tata ruang kota. PKL juga biasanya merupakan usaha mandiri yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dasar, terutama di tengah keterbatasan lapangan kerja di sektor formal (Arlinda & Dyah, 2017:2)

PKL sering kali diidentifikasi dengan ciri-ciri seperti modal usaha yang kecil, lokasi berjualan yang tidak menetap, dan pola kerja yang fleksibel namun tidak teratur. Keberadaan mereka memainkan peran penting dalam menyediakan barang dan jasa dengan harga terjangkau, tetapi juga menghadirkan tantangan berupa pencemaran lingkungan, ketidakteraturan tata ruang, dan konflik penggunaan ruang publik (Hasanuddin, 2019:62).

2.1.6 Teori/Konsep Pasar Tradisional Berbasis Modern

Pasar tradisional berbasis modern adalah pasar yang tetap mempertahankan ciri khas tradisional seperti transaksi tawar-menawar dan keanekaragaman produk lokal, namun dilengkapi dengan fasilitas modern seperti infrastruktur yang lebih baik, kebersihan yang terjaga, dan pengelolaan yang profesional untuk meningkatkan daya tarik dan kenyamanan baik bagi pedagang maupun pembeli (Hasanuddin, 2019:63). Pasar ini menjadi alternatif yang diharapkan dapat mengintegrasikan kebutuhan masyarakat akan pasar tradisional dengan standar pengelolaan yang lebih baik, sehingga mampu bersaing dengan pasar modern. Penerapan konsep pasar tradisional berbasis modern biasanya melibatkan perbaikan pada fasilitas fisik seperti kios yang lebih rapi, area parkir yang memadai, fasilitas kebersihan seperti tempat sampah, serta ruang yang lebih tertata untuk menciptakan kenyamanan bagi pengunjung. Selain itu, pasar ini juga mengintegrasikan aspek pengelolaan berbasis teknologi untuk mempermudah manajemen pasar dan transparansi antara pihak pengelola dan pedagang (Afati, 2020:45).

Dalam konteks ini, pasar tradisional berbasis modern tidak hanya menjadi tempat transaksi ekonomi, tetapi juga berfungsi sebagai pusat aktivitas sosial dan budaya yang mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar. Konsep ini diharapkan dapat memberikan solusi bagi masalah yang sering dihadapi pasar tradisional, seperti ketidakteraturan, kebersihan yang kurang terjaga, dan menurunnya minat masyarakat untuk berbelanja di pasar tradisional (Hasanuddin, 2019:65). Pasar Tradisional Berbasis Modern Teluk Kuantan merupakan salah satu proyek revitalisasi pasar yang bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan,



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

kebersihan, dan keteraturan aktivitas perdagangan di Kota Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Pasar ini dibangun di atas lahan seluas 8,6 hektare dan memiliki kapasitas untuk menampung lebih dari 500 pedagang. Sebagian besar pedagang yang menempati pasar ini sebelumnya berjualan di sepanjang jalan sekitar Pasar Rakyat, dan telah direlokasi untuk menciptakan lingkungan kota yang lebih tertata dan nyaman bagi pengunjung.

Kemudian terkait biaya atau harga sewa lapak di Pasar Tradisional Berbasis Modern Teluk Kuantan diatur dalam Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 20 Tahun 2008 mengatur tentang penataan dan penempatan hak sewa kios dan pelataran pedagang Pasar Tradisional Teluk Kuantan. Pasar ini memiliki sekitar 427 kios dengan nilai sewa tahunan per kios sekitar Rp.1.200.000, yang dibayar setiap enam bulan Rp.600.000. Namun, meskipun telah dilakukan upaya penataan, pasar ini masih menghadapi beberapa tantangan. Salah satu masalah utama adalah kondisi infrastruktur di sekitar pasar, khususnya jalan akses masuk dan keluar yang rusak parah, menyebabkan ketidaknyamanan bagi pengunjung dan pedagang. Selain itu, penataan lahan parkir yang kurang rapi sering menyebabkan kemacetan di sekitar pasar, terutama saat aktivitas bongkar muat barang dagangan. Meskipun demikian, pemerintah daerah terus berupaya untuk mengatasi permasalahan ini dan menjadikan Pasar Tradisional Berbasis Modern Teluk Kuantan sebagai percontohan pasar tradisional yang tertata dan modern di Provinsi Riau. Langkah-langkah seperti penertiban pedagang, pemantauan harga bahan pokok, dan perbaikan fasilitas pasar terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kenyamanan pasar bagi masyarakat.

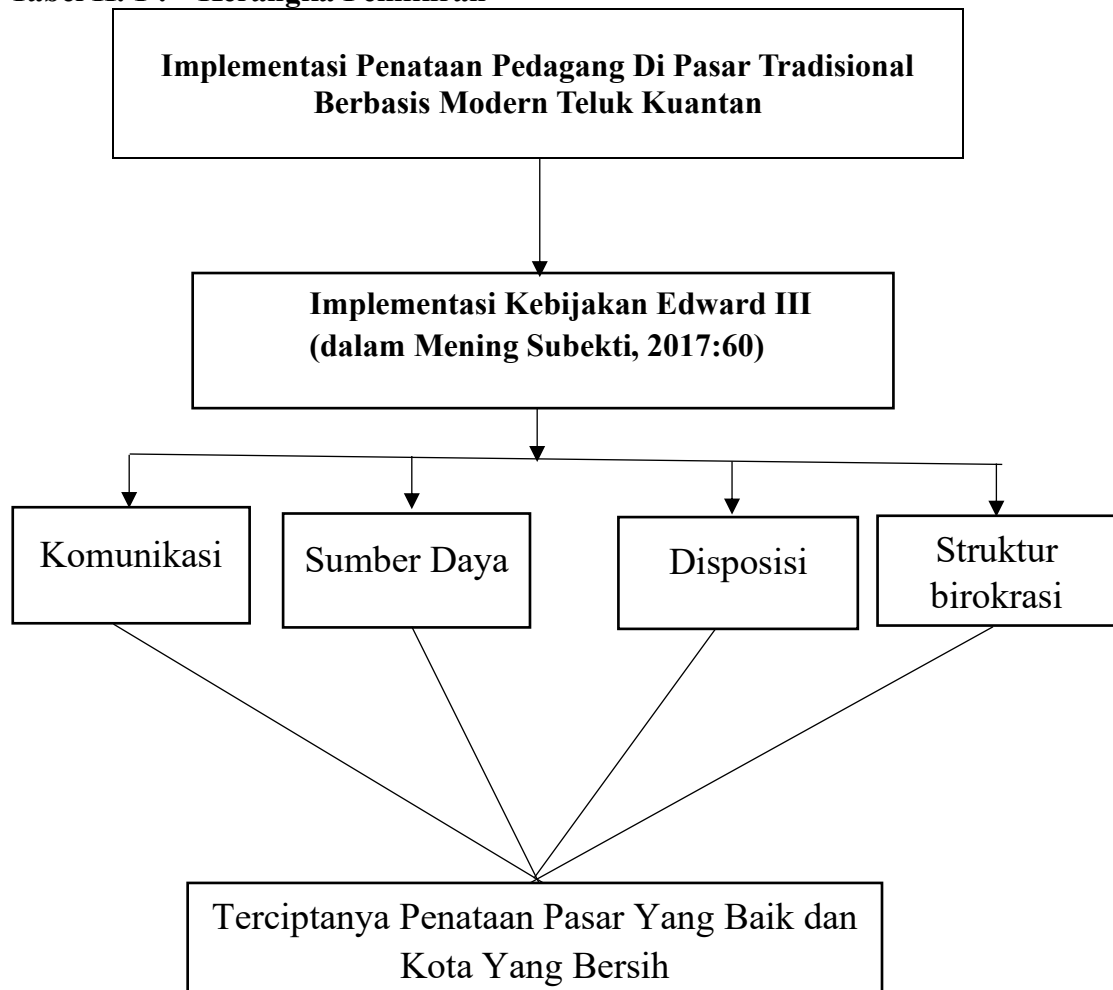
Berdasarkan hasil observasi lapangan yang didukung dengan dokumentasi visual, kondisi Pasar Tradisional Berbasis Modern Teluk Kuantan hingga saat ini masih menghadapi berbagai permasalahan yang bertentangan dengan prinsip dasar dari pasar modern, yaitu ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan. Secara fisik, pasar ini telah memiliki bangunan semi permanen yang dirancang untuk mendukung aktivitas jual beli dengan fasilitas yang lebih baik dibandingkan pasar tradisional konvensional. Namun, realita di lapangan menunjukkan bahwa banyak pedagang yang masih memilih berjualan di area luar bangunan utama, seperti di bahu jalan atau lahan terbuka dengan menggunakan tenda darurat. Hal ini menyebabkan tatanan pasar tampak tidak teratur dan cenderung semrawut. Penempatan pedagang yang tidak sesuai dengan peruntukannya juga mengganggu arus lalu lintas dalam pasar dan mengurangi kenyamanan pengunjung. Di sisi lain, aspek kebersihan pasar juga menjadi persoalan yang cukup mencolok. Terlihat banyaknya sampah yang berserakan di sekitar area pasar, terutama di dekat lapak pedagang dan sepanjang jalan pasar. Kondisi ini mengindikasikan lemahnya sistem pengelolaan sampah serta kurangnya kesadaran pedagang dan pengunjung akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Minimnya fasilitas kebersihan, seperti tempat sampah yang memadai dan petugas kebersihan yang aktif, turut memperparah situasi tersebut. Jika tidak segera ditangani, keberadaan sampah ini dapat menimbulkan pencemaran lingkungan dan berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan.

Meskipun infrastruktur pasar telah tersedia, namun pemanfaatannya belum optimal. Beberapa bagian dari bangunan pasar tampak kosong atau tidak digunakan oleh pedagang. Hal ini menandakan bahwa masih terdapat kelemahan dalam hal pengelolaan, sosialisasi, dan penegakan aturan oleh pihak terkait. Selain itu, ketiadaan rambu atau petunjuk arah serta penataan area parkir yang belum tertib juga menambah kesan bahwa pasar ini belum sepenuhnya memenuhi standar pasar modern.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan konsep “pasar tradisional berbasis modern” di Pasar Teluk Kuantan masih belum terlaksana secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan upaya penataan dan pengawasan yang lebih intensif dari pemerintah daerah dan pengelola pasar, antara lain: 1. Menata ulang posisi dan zonasi pedagang agar sesuai dengan rencana tata ruang pasar, 2. Menyediakan fasilitas kebersihan yang memadai serta meningkatkan kesadaran lingkungan di kalangan pedagang, 3. Mengoptimalkan pemanfaatan bangunan pasar melalui pendekatan persuasif dan edukatif, 4. Menata sistem lalu lintas dan area parkir di dalam pasar agar tercipta kenyamanan dan keteraturan.

2.2 Kerangka Pemikiran

Tabel II. 1 : Kerangka Pemikiran





Sumber: modifikasi peneliti tahun 2025

2.3 Definisi Operasional

Konsep operasional adalah konsep secara jelas mengenai variabel-variabel penelitian untuk memberikan hasil penelitian yang seragam pada semua pengamat (Purwanto, 2007:93). Konsep operasional juga menjelaskan tentang bagaimana kegiatan yang harus dilakukan untuk memperoleh indikator yang dimaksud (Masyuri dan Zainuddin, 2008:131). Definisi operasional adalah konsep yang merinci dan mengkaji secara rinci elemen-elemen kritis dari suatu variabel atau konsep dalam sebuah penelitian atau program. Proses ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas dan konsisten tentang bagaimana suatu variabel atau konsep akan diukur atau diamati. Dalam konteks penelitian, definisi operasional membantu peneliti untuk mengukur variabel-variabel tertentu dengan cara yang obyektif dan dapat diulang.

2.4 Operasional Variabel

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian	Ukuran
Implementasi	Implementasi Kebijakan	1. Komunikasi	a. Transmisi	Ordinal
			b. Kejelasan	
			c. Tujuan	
		2. Sumber Daya	a. SDM	Ordinal
			b. Finansial	
		3. Disposisi	Sikap	Ordinal
		4. Struktur Birokrasi	Pragmentasi	Ordinal

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Kaitan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif untuk menjelaskan dan menggambarkan mengenai Implementasi Penataan Pedagang di Pasar Tradisional Berbasis Modern Teluk Kuantan

3.2 Informan

Informan adalah individu yang memiliki pengetahuan, pengalaman, atau keterlibatan langsung dalam fenomena yang diteliti dan bersedia memberikan informasi kepada peneliti. Pemilihan informan dilakukan secara sengaja berdasarkan relevansi dengan fokus penelitian. (Sugiyono, 2018:225).

No	Unsur Informan	Jumlah		Persentase (%)
		informan	Key Informan	



1	Kadis	1	1	100%
2	Pegawai	3	3	100%
3	Pengelola Pasar	1	1	100%
3	Pedagang Kaki Lima	15	15	100%
Jumlah		20	20	100%

Sumber : Data Olahan 2025

3.3 Sumber Data

3.3.1 Data Primer

Menurut Sugiyono (2016:156) data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data ke peneliti. Data Primer adalah data yang merujuk kepada informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pertama kali. Jenis data ini disusun dan dikumpulkan secara khusus untuk tujuan penelitian atau analisis tertentu.

3.3.2 Data Sekunder

Data Sekunder adalah pengolahan data primer dan disajikan dalam bentuk tabel atau diagram, oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain (Sugiyono, 2016:137).

3.4 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Implementasi Penataan Pedagang di Pasar Tradisional Berbasis Modern Teluk Kuantan.

3.5 Lokasi Penelitian

Dinas Koperasi Kabupaten Kuantan Singingi yang berlokasi di Jl. Patimura Komplek Pemda 29562, Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

3.6.1 Observasi

Menurut Nasution dalam Sugiyono (2020:109) observasi adalah kondisi dimana dilakukannya pengamatan secara langsung oleh peneliti agar lebih mampu memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial sehingga dapat diperoleh pandangan yang holistik (menyeluruh).

3.6.2 Wawancara

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2020:114) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

3.6.3 Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2020:124) dokumentasi merupakan pengumpulan dari catatan peristiwa yang sudah berlaku baik berbentuk tulisan, gambar/foto atau karya-karya monumental dari seseorang/instansi.

3.6.4 Triangulasi

Menurut Sugiyono (2014:125) triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Dalam teknik Triangulasi peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama.

3.7 Metode Analisis Data

Menurut Sugiyono (2019:112) adalah serangkaian langkah atau prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menafsirkan data guna menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis.

3.7.1 Pengumpulan Data

3.7.2 Reduksi Data

3.7.4 Penyajian Data

3.7.4 Pengambilan Keputusan atau Verifikasi

Hasil Penelitian dan Pembahasan Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Tradisional Berbasis Modern Teluk Kuantan

Berdasarkan indikator tentang Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Tradisional Berbasis Modern Teluk Kuantan penulis menggunakan teori model implementasi dari Edward III dalam analisis ini beberapa kriteria yang digunakan adalah komunikasi, sumber daya, disposisi, dan Struktur Birokrasi. Maka dibawah ini akan dipaparkan hasil penelitian yang akan menjelaskan Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Tradisional Berbasis Modern Teluk Kuantan, dapat dilihat dari tiap-tiap indikator dibawah ini.

Indikator Komunikasi

Analisa dari indikator komunikasi menunjukkan bahwa proses transmisi informasi kebijakan dari pemerintah kepada pelaksana maupun sasaran kebijakan telah berlangsung secara langsung, rutin, dan jelas. Petugas Diskopdagrin secara aktif melakukan pendekatan ke para pedagang melalui berbagai media, baik formal maupun informal, seperti pertemuan lapangan, sosialisasi langsung, dan diskusi personal. Kejelasan pesan juga menjadi salah satu kekuatan dalam proses ini. Para pedagang menyatakan bahwa informasi yang mereka terima disampaikan secara lugas dan tidak membingungkan. Petugas dinas menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat awam, dan terbuka untuk memberikan penjelasan ulang jika dibutuhkan. Hal ini menunjukkan kualitas komunikasi yang tinggi dan efektif, yang menjadi fondasi awal penting dalam proses implementasi kebijakan.



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

Berdasarkan teori Edward III, komunikasi yang tidak efektif dapat menghambat keberhasilan implementasi kebijakan. Temuan ini menunjukkan bahwa lemahnya komunikasi menyebabkan rendahnya pemahaman PKL terhadap tujuan relokasi. Kurangnya sosialisasi dan ketidakjelasan informasi menjadi faktor utama resistensi pedagang, sehingga menghambat tercapainya tujuan kebijakan penataan PKL di Teluk Kuantan.

Indikator Sumber Daya

Dalam hal Sumber Daya Manusia, hasil penelitian memperlihatkan bahwa petugas dinas dinilai cukup kompeten dan memahami tugasnya. Mereka tidak hanya memiliki pemahaman teknis yang baik, tetapi juga memperlihatkan kemampuan dalam berinteraksi sosial, seperti ramah, sabar, dan solutif saat menghadapi dinamika pedagang di lapangan. Kolaborasi dan solidaritas antarpegawai juga berjalan baik, yang semakin memperkuat pelaksanaan program. Namun, pada aspek sumber daya finansial, ditemukan bahwa terdapat kendala signifikan yang menghambat kelancaran implementasi kebijakan secara optimal. Keterbatasan anggaran mengakibatkan beberapa program strategis seperti penyediaan fasilitas fisik, pelatihan, atau bantuan langsung kepada pedagang menjadi belum terlaksana secara maksimal. Bahkan beberapa kegiatan terpaksa ditunda karena belum tersedia pendanaan yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun komitmen dan kemampuan SDM telah memadai, dukungan anggaran masih menjadi hambatan utama.

Mengacu pada teori Edward III, sumber daya merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tanpa dukungan sumber daya yang memadai, kebijakan tidak dapat dijalankan dengan optimal. Kondisi ini mengakibatkan ketidaknyamanan PKL di lokasi baru dan menurunkan efektivitas program relokasi.

Indikator Disposisi (Sikap Pelaksana Kebijakan)

Sikap dan karakter pegawai dalam menjalankan kebijakan sangat menentukan efektivitas di lapangan. Berdasarkan data yang dikumpulkan, pegawai Diskopdagrin menunjukkan sikap yang cenderung positif, adaptif, dan profesional. Meski gaya pendekatan tiap individu berbeda, sebagian besar petugas mampu menyesuaikan pendekatan dengan karakter pedagang, menjaga komunikasi yang baik, dan tetap bersikap tegas namun tidak represif. Pendapat dari para pedagang juga senada, menyatakan bahwa petugas cenderung bersikap baik dan komunikatif, meskipun ada kalanya mereka bersikap tegas dalam menghadapi pelanggaran. Hal ini menunjukkan bahwa disposisi pelaksana kebijakan sudah cukup baik dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan ini.

Menurut Edward III, keberhasilan implementasi sangat bergantung pada disposisi pelaksana. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa inkonsistensi sikap aparat berdampak pada lemahnya pelaksanaan di lapangan. Kurangnya komitmen dan ketidakseragaman tindakan memperlemah proses relokasi dan menyebabkan kebijakan tidak berjalan sebagaimana mestinya.



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

Indikator Struktur Birokrasi

Meskipun belum dijabarkan secara mendalam dalam hasil wawancara, berdasarkan gambaran umum yang muncul dari respons para pegawai dan pedagang, struktur birokrasi tampaknya cukup responsif dan tidak menghambat proses implementasi. Adanya koordinasi antar bidang, keterbukaan dalam memberikan informasi, serta sistem kerja yang adaptif menjadi indikasi bahwa struktur organisasi telah berjalan cukup efektif, meskipun masih bisa dioptimalkan terutama dalam pengelolaan anggaran dan perencanaan program yang berkelanjutan. Teori Edward III menekankan pentingnya struktur birokrasi yang sederhana dan terkoordinasi. Ketidajelasan struktur dan prosedur dalam penelitian ini membuktikan bahwa implementasi kebijakan menjadi lambat dan tidak efektif. Kurangnya SOP dan lemahnya koordinasi antar instansi menyebabkan hambatan serius dalam mencapai tujuan kebijakan relokasi PKL.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini membuktikan bahwa keempat indikator implementasi menurut Edward III (komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi) belum terpenuhi dengan baik. Komunikasi yang tidak efektif, keterbatasan sumber daya, lemahnya komitmen pelaksana, dan struktur birokrasi yang tidak efisien menjadi faktor penghambat utama. Oleh karena itu, upaya pemerintah daerah perlu diperbaiki terutama dalam aspek komunikasi strategis, penyediaan fasilitas, pelatihan aparat, dan perbaikan koordinasi antar instansi agar tujuan relokasi PKL dapat terimplementasi dengan baik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan pemerintah dalam penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Tradisional Berbasis Modern Teluk Kuantan belum terimplementasi.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

- 1.1.1 Meningkatkan Sosialisasi Kebijakan: Pemerintah daerah perlu meningkatkan intensitas dan kualitas sosialisasi kebijakan kepada PKL dengan pendekatan yang lebih komunikatif, partisipatif, dan berkelanjutan agar para pedagang dapat memahami dan menerima kebijakan relokasi dengan baik.
- 1.1.2 Perbaikan Fasilitas di Lokasi Relokasi: Penting untuk segera memperbaiki dan menambah fasilitas di lokasi relokasi, seperti aksesibilitas, sanitasi, dan sarana penunjang usaha, agar tempat tersebut menjadi lebih layak dan dapat mendukung kelangsungan usaha PKL.
- 1.1.3 Membangun Kemitraan dengan PKL: Pemerintah sebaiknya membangun kemitraan yang lebih kuat dengan PKL melalui forum dialog rutin, pelatihan



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

- kewirausahaan, serta penyediaan akses terhadap permodalan, agar proses pemberdayaan dapat berjalan dengan lebih menyeluruh dan efektif.
- 1.1.4 Meningkatkan Koordinasi Antar Instansi: Pemerintah harus meningkatkan koordinasi antar instansi terkait dalam implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL, agar proses pelaksanaan dapat berjalan dengan efisien, tanpa adanya tumpang tindih kebijakan.
 - 1.1.5 Pendekatan Humanis dalam Penataan: Proses relokasi dan penataan PKL sebaiknya lebih mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan pedagang. Pendekatan yang berbasis pada nilai kemanusiaan akan membantu menciptakan hubungan yang lebih baik antara pemerintah dan PKL serta memastikan kebijakan berjalan lebih adil dan berkelanjutan.
 - 1.1.6 Menata ulang posisi dan zonasi pedagang agar sesuai dengan rencana tata ruang pasar.
 - 1.1.7 Menyediakan fasilitas kebersihan yang memadai serta meningkatkan kesadaran lingkungan di kalangan pedagang.
 - 1.1.8 Mengoptimalkan pemanfaatan bangunan pasar melalui pendekatan persuasif dan edukatif.
 - 1.1.9 Menata sistem lalu lintas dan area parkir di dalam pasar agar tercipta kenyamanan dan keteraturan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Fahmi. 2018. Teori dan Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Alma, Buchari. 2018. Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa. Bandung Alfabeta.
- Dunn, William N. 2022. Analisis Kebijakan Publik: Teori dan Metode. Jakarta Rajawali Pers.
- Kaho, Josef Riwu. 2016. Prospek Otonomi Daerah di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mulyadi, Dedi. 2020. Manajemen Kebijakan Publik: Teori dan Praktik Bandung: Alfabeta.
- Mulyadi. (2015). Implementasi Organisasi. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nugroho, Riant. 2021. Public Policy: Dinamika Kebijakan Publik di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Republik Indonesia. 2012. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Subarsono, AG. 2020. Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori, dan Aplikasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

- Soehartono, I. (2021). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. 2021. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Siagian, Sondang P. 2019. *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strategi*. Jakarta: Bumi Aksara
- Wahyudi, Yudi. 2019. *Implementasi Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Surabaya: Pustaka Pelajar.
- Widodo, Joko. 2022. *Good Governance: Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi*. Malang: UMM Press.
- Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2008. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Jurnal

- Arifin Tahir. (2015). "Implementasi Kebijakan Publik: Kajian Teoritis dan Studi Kasus." *Jurnal Administrasi Publik*, 3(2), 93–102.
- Afiati, A. N. (2020). *Penataan Pedagang Kaki Lima dan Keberadaan JPM Tanah Abang (Studi atas Dampak Relokasi Pedagang Kaki Lima di Tanah Abang)*. Repository UIN Jakarta.
- Arlinda, D., & Dyah, R. S. (2017). *Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang: Antara Strategi Bertahan Hidup dan Penataan Kota*. *Jurnal Perkotaan*, 15(2), 1-10.
- Hamdi, R. (2015). "Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik dalam Konteks Otonomi Daerah." *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 5(3), 36–45.
- Hasanuddin. (2019). *Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Pasar Tanah Abang*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Manajemen (JIAM)*, 15(1), 59–70.
- Istiqomah, N., Rahmawati, A., & Hidayati, S. 2023: 45. "Analisis Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kota X." *Jurnal Ilmu Administrasi*, Volume 10 No. 1.
- Kiwang, E. (2016). *Analisis Kebijakan dan Efektivitas Organisasi*. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 20(3), 120–130. Universitas Gadjah Mada.



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

- Laary, Y., Tulusan, F. M. G., & Dengo, S. (2022). Implementasi Kebijakan Keamanan dan Ketertiban di Desa Baru Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(120), 60–67.
- Rizkianty, D., et al. (2021). "Role of Bureaucracy in Policy Implementation." *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8(2), 55–65.
- Rachmawati, D. (2016). Analisis Pelaksanaan Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kota Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 1(1), 1-12.
- Sa'adah, L., & Wicoro, A. (2022). Dampak Relokasi Pedagang Kaki Lima Alun-Alun Jombang (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima di Jalan Dr. Soetomo dan Jalan Kusuma Bangsa). *Economicus*, 16(1), 91-100.
- Samahita, Randi. 2024: 960. "Strategi Negosiasi Pemerintah Kota Madiun dalam Proses Relokasi Pedagang Kaki Lima." *Journal Publicuho*, Volume 7 No. 2.
- Subekti, M. (2017). Pengaruh Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi terhadap Efektivitas Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Tambak. *The Indonesian Journal of Public Administration*, 3(2), 60-67.
- Salampessy, T., et al. (2023). "Public Policy: Challenges in Developing Countries." *Journal of Political Science and Administration*, 11(3), 2–10.
- Subekti, M., Faozanudin, M., & Rokhman, A. (2017). Pengaruh komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi terhadap efektifitas implementasi program bantuan operasional sekolah pada satuan pendidikan Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Tambak. *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 3(2), 58-71.
- Sore, H., & Sabirin, A. (2017). "Stages of Public Policy Making." *Jurnal Kebijakan Publik dan Administrasi Negara*, 4(1), 24–31..
- Thoriq, M. I., & Samsudin, M. (2018). Dilema Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) ke Pasar Blauran II Kota Salatiga. *Gema Publica*, 3(2), 76-84.
- Unigal. (2018). *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*. *Dinamika Ilmu Administrasi Negara*, 7(2), 40–50. Universitas Galuh.
- Widyatama, S., & Wirawan, A. S. (2019). Modernizing Traditional Markets: A Case Study of Indonesia. *Journal of Business and Management*, 10(2), 123-135.